

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara republik Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga berbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, tentram, aman yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia, negaranya terkenal dan termashur di luar negeri dengan perekonomian yang mantap. Yang diinginkan adalah suatu masyarakat yang tentram dan aman, yang rakyatnya hidup berdampingan secara damai, yang masing-masing mempunyai mata pencarian yang mencukupi kebutuhan keluarganya, sandang, pangan, papan tidak kekurangan, hak- haknya dijamin dan dihormati oleh setiap warga, tidak ada pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Hal demikian hanya dapat dicapai melalui perekonomian yang baik dan teratur terencana dan dengan moral yang tinggi, yang berarti bahwa untuk mencapai keadaan demikian itu harus dilakukan peningkatan ekonomi dan peningkatan moral rakyat melalui pembangunan, yaitu pembangunan yang baik harus terencana.¹

¹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan* (Bandung: PT Eresco, 1988). hlm.2.

Hakekat pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam pembentukan UUD 1945. Bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sedangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan keamanan, artinya serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.²

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan

² Fahrurrazi, "Analisis penentuan sektor Unggulan Perekonomian wilayah Kab Aceh Utara Dengan pendapatan sektor pembentuk PDR". Tesis: Pascasarjana USU,(2009), h. 11.

sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.³

Dengan diberlakukannya UU No.12 Tahun 2008 perubahakedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang semakin baik.⁴

Adapun dalam melaksanakan pembangunan daerah yang meliputi segala aspek yang ditentukan oleh beberapa faktor namun

³ Arsyad, *ekonomi pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 374.

⁴ BPS, *Pendapatan Regional Kabupaten Lebak*

faktor keuangan menjadi salah satu yang sangat dominan, karena faktor keuangan yang berbentuk anggaran daerah adalah sebuah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang atau rupiah. Maka keuangan daerah harus di kelola dengan baik dalam satu periode tertentu dan bagi pembangunan daerah dapat menjadi tolak ukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.⁵

Berbicara mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

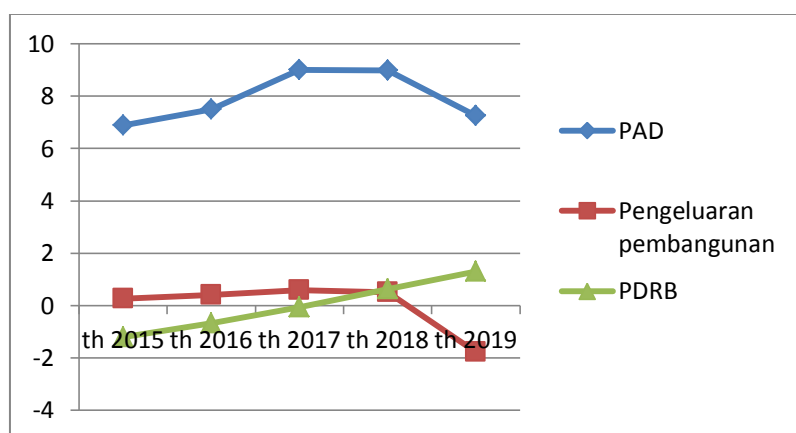
Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota, dan ibu kotanya Serang. Banten sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dimekarkan sebagai Provinsi pada

⁵ Mahmudi, *manajemen keuangan daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.14.

tanggal 17 Oktober 2000. Berikut adalah daftar kabupaten kota di Banten: 1) kabupaten Lebak, 2) kabupaten Pandeglang, 3) kabupaten tangerang, 4) kabupaten serang, 5) kota Cilegon, 6) kota tangerang, 7) kota Serang, 8) kota Tangerang Selatan.

Dalam menghadapi kondisi otonomi daerah, maka Provinsi Banten harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan Provinsi Banten menjadi daerah yang mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat. Berikut adalah data PAD, pengeluaran pembangunan, dan PDRB se-Provinsi Banten.

Gambar 1.1
KURVA DATA
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pembangunan,
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Provinsi
Banten tahun 2015-2019



(Sumber data : BPS, bappeda provinsi Banten dan kemenkeu yang di olah).

Angka-angka pertumbuhan yang telah tercapai tersebut tidak menjadikan pemerintah daerah menjadi puas dan berdiam diri. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten sangat dibutuhkan adanya peran aktif pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola keuangan daerah dan pendapatan asli daerah. Berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sampai dengan 2019, peningkatan pendapatan asli daerah dari Rp. 11.259.988.202.975.- pada tahun pada tahun 2015, selanjutnya untuk tahun 2016 sebesar Rp. 12.242.866.552.086.- seterusnya tahun 2017, 2018, 2019, masing-masing Rp. 14.711.439.834.884, Rp. 14.673.802.588.144, Rp. 11.831.983.759.800;-

Seiring dengan kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien. Jumlah pengeluaran pembangunan tahun 2015 – 2019 sebesar tahun 2015 sebesar Rp 6.363.907.842.490,- tahun 2016 sebesar Rp6.687.277.000.000,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp7.114.905.041.909,- seterusnya tahun 2018, 2019, masing-masing sebesar Rp. 6.936.218.526.672,- dan Rp. 1.696.612.176.860 ,-

Berdasarkan pada Pendapatan Regional Se-Provinsi Banten Tahun 2015, dapat diketahui bahwa program-program yang dijalankan pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yaitu berdasar pada penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yang tercatat Se-Provinsi Banten selama enam tahun dari 2015-2019 yaitu Rp. 478.737.920.,31, pada tahun 2015; Rp. 518.381.536,78 pada tahun 2016; Rp. tahun 2017; Rp. 565.877.754,18, tahun 2018; Rp. 619.080.578,30 tahun 2019; Rp. 669.366.148,91 .

Oleh karena itu dengan meninjau kembali pertumbuhan pengeluaran pembangunan Se-Provinsi Banten yang tidak banyak diikuti dengan pertumbuhan ekonominya, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian Se-Provinsi Banten.

Dari data gambar 1.1 diatas ada sesuatu yang tidak sesuai dengan teori bahwa jika PAD meningkat maka PDRB juga meningkat dan juga sebaliknya jika PAD menurun maka PDRB juga menurun, tapi pada faktanya pada tahun 2019 PAD mengalami penurunan dari 2018 Rp. 14.673.802.588.144 dan di tahun 2019 Rp. 11.831.983.759.800, akan tetapi PDRB mengalami peningkatan pada

tahun 2018 sejumlah Rp. 619.080.578,30 dan ditahun 2019 menjadi Rp. 669.366.148,91.

Begitupun dengan teori PDRB dengan pengeluaran pembangunan dimana keduanya memiliki definisi yang berbeda menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pembangunan memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi *riil* melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengeluaran

Pembangunan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Se- Provinsi Banten Tahu 2015-2019”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan diatas yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penyumbang pengeluaran pembangunan di Provinsi Banten.
2. Pada tahun 2018 PAD mengalami penurunan akan tetapi PDRB mengalami kenaikan.
3. PDRB selalu mengalami kenaikan tetapi pengeluaran pembangunan tidak seimbang.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini diperlukan supaya permasalahan tak meluas dan meyimpang dari permasalahan yang sudah dirumuskan penulis, mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana agar hasil penelitian lebih terfokus. Maka dalam penelitian ini penulis membataskan penulisannya pada Pendapatan Asli daerah Provinsi Banten (X1), Pengeluaran Pembangunan (X2), terhadap PDRB Se-

Provinsi Banten (Y). Waktu penelitian ini dari bulan Desember 2020 - Maret 2021 yang berlokasi se-Provinsi Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Provinsi Banten 2015-2019 ?
3. Berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2015-2019 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2015-2019
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2015-2019

3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2015-2019

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk belajar, menambah wawasan dan memperdayakan pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lebak, khususnya dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Provinsi Banten.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menambah referensi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data ataupun informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu pula penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga dalam memberi pendidikan kepada mahasiswa.

3. Bagi pemerintah Provinsi Banten, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

G. Kerangka pemikiran

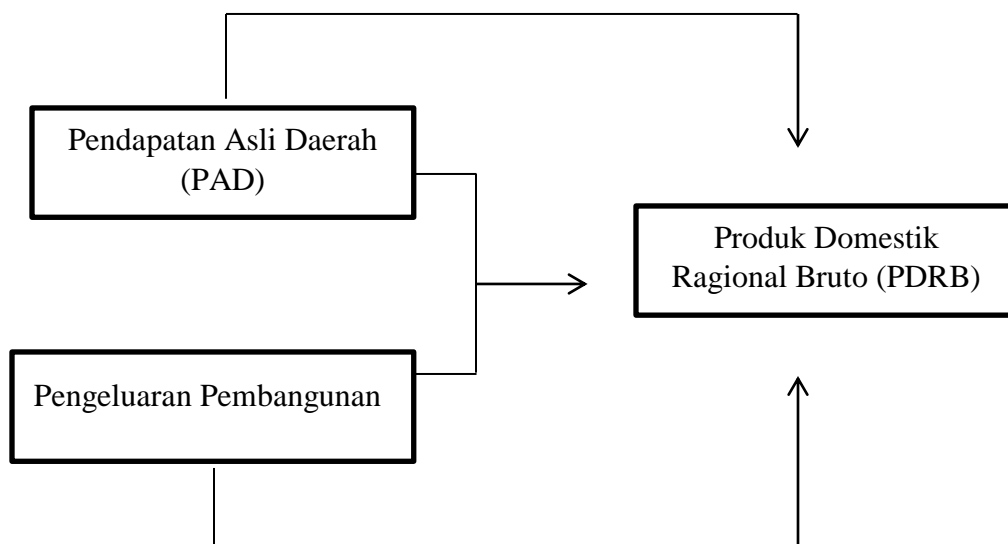
Secara umum kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, sosial, budaya serta jaminan persamaan hak dalam politik, hukum dan keamanan/ketertiban. Indikator-indikator output tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (komposit) dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial.

Dari kerangka pikir dibawah ini maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penentu pertumbuhan ekonomi atau PDRB terdiri dari akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Dalam membiayai pembangunan daerah melalui pengeluaran pembangunan baik proyek fisik dan proyek non fisik salah satu modal yang digunakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan salah satu kesiapan dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi

telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Jadi yang harus diperhatikan ialah pengenaan pajak dan retribusi hendaknya sering dengan tingkat pendapatan masyarakat serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga secara agregat harus seiring dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB).⁶

Berdasarkan teori tersebut, peneliti tertarik untuk melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap PDRB di Se-Provinsi Banten yang tertuang dalam kerangka pikir penelitian ini yang digambarkan pada Gambar di bawa ini:



⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 5

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.⁷ Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berfikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_a^1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten.

H_a^2 : Pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten

H_a^3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap PDRB Se-provinsi Banten.

⁷ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016)

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab I Pendahuluan, bab II Kajian Teoritis, bab III Metode Penulisan, bab IV Pembahasan Hasil Penulisan dan bab V Kesimpulan dan Saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut:

Bab ke-satu : Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistmatika pembahasan.

Bab ke-dua : Kajian teoritis bab ini membahas tentang kajian pustaka yang akan membahas teori-teori meliputi Pendapatan perkapita, tingkat suku bunga, dan permintaan uang.

Bab ke-tiga : Metodologi penelitian bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian , jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian.

Bab ke-empat: Deskripsi hasil penelitian bab ini membahas uraian hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisis dan terpadu.

Bab ke-lima: Penutup bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil Analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.